

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim menjadi fenomena dengan dampak destruktif paling signifikan yang merambat pada berbagai sektor dalam kehidupan bernegara.¹ Fenomena ini memicu ekspansi termal lautan yang mengakibatkan kenaikan permukaan laut yang terus meningkat. Tercatat dalam laporan sintesis Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang dirilis pada tahun 2023, serta World Meteorological Organization (WMO) dalam laporan State of Global Climate 2024, bahwa akumulasi kerusakan akibat krisis iklim berpotensi tinggi memicu ketidakstabilan sistemik global. Kenaikan permukaan laut global melonjak hingga mencapai laju 5,9 mm pada tahun 2024.²

Bagi sebagian besar negara, fenomena ini mungkin hanya berdampak pada kerugian ekonomi pesisir atau kerusakan beberapa infrastruktur yang berada di wilayah pesisir. Namun, bagi negara-negara atol, hal ini mengancam tergerusnya garis teritorial yang menjadi batas fisik kedaulatan mereka.³ Hilangnya daratan akibat kenaikan permukaan laut berarti hilangnya basis material bagi pelaksanaan

¹ IPCC, "Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2023 Synthesis Report" (Ganewa, 2023), <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>.

² WMO, "State of the Global Climate Update for COP30," 2025, [https://wmo.int/sites/default/files/2025-11/State of the Climate 2025 Update COP30 %2831 oct%29.pdf](https://wmo.int/sites/default/files/2025-11/State%20of%20the%20Climate%202025%20Update%20COP30%20oct%29.pdf).

³ WMO, "State of the Global Climate 2024 Organization, World Meteorological Organization," 2024, https://wmo.int/sites/default/files/2025-03/WMO-1368-2024_en.pdf.

pemerintahan suatu negara.⁴ Maka dari itu diperlukan adanya sekuritisasi untuk menemukan jalan keluar untuk menanggapi masalah tersebut.

Tuvalu merupakan negara yang paling sering disebut sebagai representasi ekstrem dari ancaman eksistensial akibat perubahan iklim.⁵ Negara kepulauan ini memiliki wilayah daratan yang sangat rendah dan tersebar, sehingga sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Dalam artikel daring rilisan UNDP menyebutkan, rata-rata ketinggian daratan Tuvalu pada tahun 2023 hanya berkisar kurang dari 2 meter, dengan titik tertinggi berada pada ketinggian 4,5 hingga 5 meter di atas permukaan laut.⁶ Ketinggian ini termasuk yang paling rendah dalam kategori negara atol yang berada pada *Low Elevation Coastal Zone*.⁷

Menurut data NASA *sea level change team* tahun 2024, wilayah fisik Tuvalu dapat menjadi tidak layak huni atau tenggelam sepenuhnya abad ini.⁸ Pada tahun 2023 juga sudah tercatat sekitar 40 persen dari luas daratan Funafuti, ibu kota Tuvalu, telah mengalami kerusakan permanen akibat erosi dan intrusi air laut.⁹ Pada situasi yang genting ini, kota Funafuti adalah pusat pemerintahan Tuvalu yang menampung infrastruktur nasional vital, terutama bandara, Pelabuhan, Gedung

⁴ “Montevideo Convention on the Rights and Duties of States,” Pub. L. No. Pasal 1, 1 (1933).

⁵ Tauisi Taupo, Harold Cuffe, dan Ilan Noy, “Household Vulnerability on the Frontline of Climate Change: The Pacific Atoll Nation of Tuvalu,” Category 10: Energy and Climate Economics, 2016, www.cesifo.org/wp.

⁶ UNDP, “Te Lafiga o Tuvalu - Tuvalu’s Long Term Adaptation Plan,” UNDP Climate Change Adaptation, 2023, <https://www.adaptation-undp.org/resources/videos/te-lafiga-o-tuvalu-tuvalu-long-term-adaptation-plan-november-2022>.

⁷ Gordon Mcgranahan, Deborah Balk, and Bridget Anderson, “The Rising Tide: Assessing the Risks of Climate Change and Human Settlements in Low Elevation Coastal Zones,” *International Institute for Environment and Development* 19, no. 1 (2007): 17–37, <https://doi.org/10.1177/0956247807076960>.

⁸ NASA Sea Level Change Team, “Sea Level Summary for Funafuti , Tuvalu,” 2024, sealevel.nasa.gov/flooding-analysis-tool-pacific-islands.%0ASea.

⁹ NASA Sea Level Change Team.

pemerintahan, satu-satunya rumah sakit, pusat telekomunikasi, dan pembangkit listrik.

Dalam *country report* Tuvalu tahun 2023 IMF juga menyebutkan bahwa Tuvalu tidak bisa bertumpu lagi pada sektor maritim yang tidak menentu. Namun, disamping itu sebanyak 4 persen dari PDB Tuvalu tetap harus digunakan hanya untuk beban belanja rutin pemeliharaan tahunan infrastruktur pelindung pantai.¹⁰ Hal ini menjadikan Tuvalu sangat bergantung pada dana hibah eksternal yang mencapai hampir setengah dari total anggaran negara untuk menutupi defisit operasional.¹¹ Besarnya ketergantungan ini bahkan menciptakan kondisi perangkap fiskal di mana kedaulatan ekonomi negara terus tergerus karena prioritas anggaran nasional tidak lagi dialokasikan untuk pembangunan produktif, melainkan habis tersedot untuk biasa adaptasi defensif dan pemulihan bencana.

Menghadapi ancaman ini, Pemerintah Tuvalu melakukan sekuritisasi dengan menempatkan isu perubahan iklim sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan negara. Hal tersebut terlihat dari cara pemerintah Tuvalu membangun narasi mengenai kenaikan permukaan laut sebagai ancaman terhadap keberadaan Tuvalu. Salah satu bentuknya terlihat dalam pidato Menteri Luar Negeri Simon Kofe pada COP26 tahun 2021 di Glasgow, ketika ia menyampaikan pidato dengan latar wilayah Tuvalu yang telah tergenang air laut. Cara pemerintah Tuvalu menyampaikan dan mengembangkan isu tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim telah ditempatkan dalam kerangka keamanan yang berkaitan dengan keberlangsungan negara.

¹⁰ IMF, “2023 article iv consultation — press release; staff report; and statement by the executive director for tuvalu” (Washington, D.C, 2023).

¹¹ World Bank, “Pacific Economic Update: Diminishing Growth amid Global Uncertainty: Ramping up Investment in the Pacific” (Washington D.C, 2024).

Sekuritisasi perubahan iklim kemudian diikuti dengan berbagai tindakan yang diarahkan pada keberlangsungan Tuvalu. Pada tahun 2023, Tuvalu menandatangani Falepili Union Treaty dengan Australia yang memuat pengaturan terkait *climate mobility pathway*, *continuity of statehood support*, dan kerja sama keamanan bilateral.¹² Pada tahun yang sama, Tuvalu juga mengesahkan Constitution of Tuvalu Act 2023 yang menegaskan keberlangsungan negara Tuvalu meskipun terjadi kehilangan wilayah fisik akibat kenaikan permukaan laut.¹³ Selain itu, Tuvalu juga mengembangkan Rising Nations Initiative dan Digital Nation sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas dan status kenegaraan dalam sistem internasional.¹⁴

Urgensi penelitian ini semakin menguat dengan situasi Tuvalu yang menghadapi prospek kehilangan teritorial dalam jangka waktu yang relatif dekat. Ancaman ini memiliki implikasi yang sangat serius dalam konteks hukum dan politik internasional. Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara mensyaratkan empat elemen konstitutif negara, yaitu populasi permanen, wilayah yang ditentukan, pemerintahan, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain.¹⁵ Namun, hingga saat ini sistem internasional belum memiliki preseden maupun yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman tentang bagaimana menjamin keamanan negara tanpa wilayah.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana proses konstruksi isu kenaikan permukaan laut pada ranah keamanan yang dilakukan Tuvalu. Proses ini

¹² A Green dan D Guilfoyle, "The Australia-Tuvalu Falepili Union Treaty: Statehood and Security in the Face of Anthropogenic Climate Change," *American Journal of International Law* 118, no. 4 (2024): 684–703, <https://doi.org/10.1017/ajil.2024.54>.

¹³ Tuvalu, "The Constitution of Tuvalu Act" (2023).

¹⁴ Alfonso Hegde, "Digital Nations and the Future of the Climate Crisis" 18 (2024): 755–61.

¹⁵ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States.

menjadi krusial untuk dikaji karena merepresentasikan tindakan negara dalam mempertahankan kedaulatan tanpa kehadiran basis daratan yang permanen. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan guna mengkaji tindakan yang dapat menjadi preseden terhadap tatanan global di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Percepatan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim menempatkan negara kepulauan dataran rendah seperti Tuvalu pada ancaman kehilangan wilayah. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam sistem internasional karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk menjamin keberlanjutan status kenegaraan ketika elemen teritorial terancam hilang. Dalam situasi tersebut, Tuvalu melakukan berbagai upaya di tingkat domestik, regional, dan bahkan global untuk membingkai masalah kenaikan permukaan laut ini sebagai isu keamanan. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah Tuvalu, sebagai negara yang mengalami ancaman eksistensial, melakukan sekuritisasi isu kenaikan permukaan laut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disusun, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah Bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan Tuvalu terhadap isu perubahan iklim yang mengancam eksistensial negaranya akibat kenaikan permukaan laut.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji proses pembingkai isu kenaikan permukaan laut Tuvalu yang mengancam eksistensial negaranya, ke dalam ranah keamanan. Dengan kajian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah terangkumnya proses sekuritisasi terkait isu kenaikan permukaan laut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur lingkup Pasifik Selatan, yang sering kali kalah populer dibandingkan isu-isu kawasan Asia Timur atau Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan contoh penerapan teori keamanan non-militer, dalam hal ini mengangkat isu perubahan iklim.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi pertahanan negara menghadapi krisis iklim. Temuan awal mengenai mekanisme mobilitas penduduk dalam Falepili Union dapat dijadikan *blueprint* atau studi kasus penting bagi negara-negara kepulauan kecil lainnya (SIDS) yang menghadapi ancaman serupa. Selain itu, bagi negara kepulauan besar seperti Indonesia, analisis mengenai strategi negosiasi yang dilakukan Tuvalu ini dapat menjadi masukan dalam diplomasi iklim di forum multilateral.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa referensi yang dinilai relevan dan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Referensi ini akan digunakan untuk menganalisis dan mencari jawaban dari penelitian. Adapun literatur tersebut yaitu:

Artikel Athaulla A. Rasheed berjudul *Small Island Developing States and Climate Securitisation in International Politics: Towards a Comprehensive Conception*, berangkat dari kritik terhadap cara isu keamanan iklim diperlakukan dalam politik internasional, khususnya di forum Dewan Keamanan PBB.¹⁶ Rasheed menunjukkan bahwa meskipun perubahan iklim semakin sering dibicarakan sebagai isu keamanan, pendekatan yang digunakan masih sangat sempit karena

¹⁶ Athaulla A Rasheed, "Small Island Developing States and climate securitisation in international politics: Towards a comprehensive conception," *Island Studies Journal* 18, no. 1 (2023): 161–85.

didominasi oleh logika keamanan tradisional yang menekankan konflik bersenjata, instabilitas regional, dan risiko kekerasan. Dalam kerangka tersebut, pengalaman negara-negara SIDS direduksi menjadi faktor pendukung konflik, bukan sebagai ancaman keamanan eksistensial itu sendiri.

Rasheed kemudian mengembangkan argumen bahwa bagi SIDS, perubahan iklim tidak dapat dipahami sebagai ancaman tidak langsung atau jangka panjang, melainkan sebagai ancaman yang secara langsung menggerus fondasi material negara, mulai dari wilayah daratan, sumber daya alam, hingga kapasitas pemerintahan. Dalam bagian ini, Rasheed secara eksplisit mengaitkan perubahan iklim dengan risiko *statelessness*, delegitimasi kedaulatan, dan ketidakpastian status hukum negara di masa depan. Lebih lanjut, Rasheed mengkritik kecenderungan sekuritisasi iklim yang berhenti pada level artikulasi normatif dan advokasi moral di forum internasional. Ia menunjukkan bahwa meskipun SIDS berhasil meningkatkan visibilitas isu perubahan iklim sebagai ancaman serius, hasil dari sekuritisasi tersebut sering kali bersifat simbolik. Artikel ini juga membedakan antara sekuritisasi sebagai pengakuan politik dan sekuritisasi sebagai praktik yang memiliki konsekuensi institusional, dengan menegaskan bahwa sebagian besar upaya SIDS masih berada pada kategori pertama. Dengan demikian, Rasheed menyimpulkan perlunya konsepsi sekuritisasi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya melihat bahasa dan legitimasi, tetapi juga dampaknya terhadap kebijakan, institusi, dan praktik negara.

Artikel Rasheed mendukung penelitian ini dari dua sisi utama. Pertama, artikel ini menyediakan dasar konseptual untuk memosisikan perubahan iklim sebagai ancaman keamanan eksistensial bagi negara kepulauan kecil, sehingga

memperkuat legitimasi teoretis penelitian yang tidak lagi menempatkan isu ini sebagai sekadar persoalan lingkungan atau pembangunan. Kedua, dengan menunjukkan bahwa sekuritisasi iklim oleh SIDS sejauh ini masih dominan berada pada level artikulasi dan pengakuan normatif, Rasheed secara tidak langsung membuka ruang analisis bagi penelitian ini untuk menelusuri tahap lanjutan dari proses sekuritisasi, yakni bagaimana ancaman tersebut dikonstruksi ke berbagai bentuk tindakan.

Artikel selanjutnya yang dirujuk penulis adalah karya berjudul *Tuvalu's Foreign Policy Strategy: Confronting the Climate Crisis and the Country's Existential Threat* oleh Aninda Nuraygy Hajjisa dan Charisya (2025). Artikel ini menganalisis kebijakan luar negeri Tuvalu sebagai negara kecil dan SIDS dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dan *small state studies*. Analisis difokuskan pada bagaimana Tuvalu memanfaatkan forum multilateral, khususnya PBB dan rezim perubahan iklim global, untuk membangun solidaritas internasional, memperoleh bantuan adaptasi, serta menekan negara-negara industri melalui narasi kerentanan ekstrem dan ketidakadilan struktural. Dari kajian ini terlihat bahwa kebanyakan tindakan Tuvalu yang dihighlight oleh para analis adalah diplomasi Tuvalu masih banyak bergerak pada ranah normatif dan moral yang menempatkan perubahan iklim sebagai isu kemanusiaan, pembangunan, dan tanggung jawab negara maju.¹⁷

Temuan Hajjisa dan Charisya membantu menegaskan bahwa meskipun Tuvalu telah berhasil mengartikulasikan perubahan iklim sebagai ancaman terhadap

¹⁷ Aninda Nuraygy Hajjisa dan Charisya, "Tuvalu's Foreign Policy Strategy: Confronting the Climate Crisis and the Country's existential Threat," *Intermestic: Journal of International Studies* 10, no. 1 (2025): 151–73, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v10n1.7>.

kedaulatan dan keberlangsungan negara, respons yang dianalisis masih berhenti pada level kebijakan luar negeri dan forum internasional. Dari titik inilah penelitian ini bergerak lebih jauh dengan menelaah bagaimana narasi ancaman tersebut diterjemahkan ke dalam praktik sekuritisasi baik di tingkat nasional maupun bilateral, sehingga mengisi kekosongan antara diskursus eksistensial dan tindakan konkret dalam kerangka *extraordinary measures*.

Penulis juga merujuk pada buku berjudul *Framing Climate Change: The Politics of Climate Change Communication* karya Greg Fry. Buku ini menganalisis bagaimana negara-negara kepulauan Pasifik diposisikan, dan memosisikan diri, dalam tatanan regional dan internasional melalui praktik *framing* politik dan diplomatik. Fry menjelaskan *framing* sebagai proses politik yang menentukan siapa yang memiliki agensi, siapa yang berbicara, dan dalam kerangka apa kepentingan kawasan Pasifik dipahami oleh aktor eksternal. Buku ini menunjukkan bahwa sejak periode pasca kolonial, negara-negara Pasifik kerap dibingkai sebagai objek kebijakan, wilayah pinggiran, atau penerima bantuan, bukan sebagai subjek politik dengan kepentingan keamanan sendiri.¹⁸ Dalam pembahasan perubahan iklim, Fry memperlihatkan bagaimana isu lingkungan menjadi salah satu medium utama bagi negara Pasifik untuk merebut kembali agensi diplomatik mereka. Namun, Fry juga menekankan bahwa framing Pasifik dalam isu iklim sering kali masih terjebak dalam ketergantungan struktural, di mana negara-negara Pasifik harus terus-menerus membuktikan kerentanannya untuk memperoleh pengakuan dan dukungan. Buku ini mendukung argumen penelitian bahwa dibutuhkan adanya

¹⁸ Greg Fry dan Sandra Tarte, *The New Pacific Diplomacy*, ed. oleh Greg Fry dan Sandra Tarte, 2015.

pembingkaian ulang terhadap isu perubahan lingkungan ke dalam ranah keamanan dengan tindak lanjut pada tingkat *high politics*.

Selanjutnya merujuk pada artikel berjudul *Sinking States: The statehood dilemma in the face of sea-level rise* oleh Andrea Caligiuri tahun 2022. Artikel ini memberikan analisis mengenai kebuntuan hukum internasional dalam mempertahankan status negara ketika unsur wilayah fisik hilang akibat kenaikan muka air laut. Caligiuri mengonfirmasi adanya kekosongan hukum, sekaligus menguji validitas solusi-solusi fisik yang selama ini ditawarkan. Ia membantah efektivitas pembangunan pulau buatan sebagai penyelamat kedaulatan. Berdasarkan rezim hukum laut saat ini, struktur buatan tidak memenuhi syarat sebagai wilayah alami dan tidak berhak menghasilkan zona maritim seperti Zona Ekonomi Eksklusif atau landas kontinen. Caligiuri juga membedah kelemahan solusi penyewaan wilayah, seperti kasus pembelian tanah oleh Kiribati di Fiji. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut hanyalah transaksi perdata kepemilikan tanah, bukan perpindahan kedaulatan, sehingga negara penyewa tetap tidak memiliki hak berdaulat di wilayah baru tersebut.¹⁹

Kontribusi artikel ini adalah memberikan landasan rasionalitas di balik tindakan Tuvalu. Analisis Caligiuri mengenai negara maritim dan pembekuan garis pangkal menjadi justifikasi yang kuat untuk menjelaskan mengapa Tuvalu melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 2023. Tindakan Tuvalu membekukan batas maritimnya merupakan upaya konkret menerapkan konsep negara maritim yang digagas Caligiuri untuk mencegah status wilayahnya berubah menjadi laut lepas saat daratannya hilang. Selain itu, argumen Caligiuri yang

¹⁹ Andrea Caligiuri, "Sinking States: The statehood dilemma in the face of sea-level rise," *Questions of International Law* 2013 (2022): 23–37.

mematahkan validitas hukum pulau buatan memperkuat urgensi Tuvalu beralih ke strategi lain, yaitu pembangunan bangsa digital melalui *metaverse*, karena pertahanan fisik terbukti lemah di mata hukum internasional.

Referensi selanjutnya yaitu artikel jurnal berjudul *Climate Challenges of Small Island Developing States: Cases of Tuvalu, Seychelles and Barbados* oleh Lidija Kos-Stanišić, Dana Luša, dan Borna Zgurić. Penelitian ini memberikan studi komparatif mengenai respons kebijakan tiga negara kepulauan (SIDS) dari wilayah geografis berbeda. Artikel ini secara spesifik membedakan fokus kebijakan Tuvalu dibandingkan dengan Seychelles dan Barbados. Menurut artikel ini, negara lain lebih condong pada respons kebijakan konkret seperti ekonomi biru atau energi terbarukan. Sementara Tuvalu diidentifikasi sebagai negara yang paling terancam secara eksistensial. Oleh karena itu, Tuvalu memiliki fokus kebijakan yang cukup berbeda, yaitu mempertahankan status kenegaraannya (*preserving its statehood*).²⁰ Artikel ini berkontribusi bagi penulis dalam menjustifikasi pemilihan Tuvalu sebagai objek penelitian. Referensi ini memperkuat argumen penulis bahwa kasus Tuvalu cukup penting untuk dibahas, karena dapat memberikan lingkup kajian yang baru.

Artikel Wesley Morgan dkk. (2024) berjudul *Leading from the Frontline: A History of Pacific Climate Diplomacy* secara rinci menelusuri evolusi diplomasi iklim negara-negara Pasifik sejak akhir 1980-an, dengan menempatkan Tuvalu sebagai salah satu aktor yang paling konsisten mendorong isu perubahan iklim di forum multilateral. Morgan menunjukkan bahwa strategi utama yang digunakan

²⁰ Lidija Kos Stanišić, Dana Luša, dan Borna Zgurić, "Climate Challenges of Small Island Developing States : Cases of Tuvalu , Seychelles and Barbados," *Atlantis Press* 606, no. Iicis (2021): 220–30.

Tuvalu dan negara Pasifik lain berakar pada pendekatan keadilan iklim, yakni dengan membingkai perubahan iklim sebagai ketidakadilan struktural yang dihasilkan oleh negara industri, sehingga respons yang dituntut berbentuk pengakuan moral, kompensasi ekonomi, serta mekanisme *loss and damage*. Artikel ini juga menekankan bahwa diplomasi tersebut dijalankan melalui koalisi regional dan narasi ‘korban’.²¹ Hal ini memang cukup efektif untuk meningkatkan visibilitas isu dalam wacana global, tetapi tetap dalam tanggapan normatif. Dalam kerangka ini, perubahan iklim diposisikan sebagai persoalan tanggung jawab dan pembangunan, bukan sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan negara. Akibatnya, meskipun Tuvalu berhasil membentuk solidaritas internasional, diplomasi tersebut tidak secara langsung menghasilkan instrumen yang menjamin keberlanjutan dan status hukum negara di tengah ancaman tenggelamnya wilayah.

Dalam karya lain oleh Stacy-Ann Robinson (2021) dalam artikel berjudul *Just Alternative to Litigation: Applying Restorative Justice to Climate-Related Loss and Damage* juga menguraikan bahwa mekanisme *loss and damage* menghadapi kebuntuan struktural karena ketiadaan kewajiban hukum yang mengikat, resistensi politik negara maju, serta kecenderungan penyelesaian yang bersifat simbolik dan jangka panjang. Studi ini menegaskan bahwa kerangka keadilan dan kompensasi ekonomi tidak dirancang untuk merespons ancaman eksistensial yang menuntut kepastian hukum dan tindakan segera. Robinson memperlihatkan bahwa jalur

²¹ Wesley Morgan, Salā George Carter, dan Fulori Manoa, “Leading from the Frontline: A History of Pacific Climate Diplomacy,” *The Journal of Pacific History* 59, no. 3 (2024): 353–74, <https://doi.org/10.1080/00223344.2024.2360093>.

diplomasi berbasis keadilan iklim cenderung tidak memadai untuk melindungi negara-negara yang menghadapi risiko hilangnya wilayah dan fungsi kenegaraan.²²

Kedua karya ini memberikan kontribusi bagi penelitian dalam memetakan pola lama diplomasi Tuvalu yang berfokus pada keadilan iklim dan kompensasi, sekaligus menunjukkan keterbatasan inheren dari pendekatan tersebut. Temuan tersebut membuka ruang analisis bagi penelitian ini untuk masuk dengan argumen bahwa pergeseran Tuvalu menuju pembingkai perubahan iklim sebagai ancaman keamanan eksistensial sebagai respons rasional atas kegagalan pendekatan sebelumnya dalam menjamin keberlangsungan negara secara hukum dan politik.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan analitis bagi penulis dalam memahami suatu isu dikonstruksi sebagai ancaman dalam studi hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh Thierry Balzacq, yang berangkat dari formulasi awal yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde dalam tradisi Copenhagen School.

Dalam karya Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde berjudul *Security: A New Framework for Analysis*, sekuritisasi dipahami sebagai proses di mana suatu isu diangkat menjadi isu keamanan melalui tindakan tutur yang menyatakan adanya ancaman eksistensial terhadap *referent object* tertentu. Logika dasarnya adalah bahwa dengan menyebut sesuatu sebagai ancaman, aktor berupaya memindahkan isu tersebut dari ranah non-keamanan, ke ranah keamanan yang memungkinkan

²² Stacy-ann Robinson dan D Arcy Carlson, "A just alternative to litigation: applying restorative justice to climate-related loss and damage," *Third World Quarterly* 42, no. 6 (2021): 1384–95, <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1877128>.

penggunaan langkah-langkah luar biasa. Pendekatan ini menempatkan *speech act* sebagai inti analisis, sehingga fokus utama diarahkan pada bagaimana pernyataan ancaman diproduksi dan bagaimana pernyataan tersebut memperoleh penerimaan dari *audiens* sebagai kondisi keberhasilan sekuritisasi.

Dalam formulasi ini, terdapat beberapa komponen yang menjadi dasar analisis dalam pengkajian proses sekuritisasi. Pertama, aktor sekuritisasi, yaitu pihak yang mengartikulasikan klaim ancaman dan berupaya meyakinkan audiens bahwa suatu isu harus diperlakukan sebagai persoalan keamanan. Dalam penelitian ini, aktor yang dimaksudkan adalah pemerintah Tuvalu sebagai representasi negaranya. Kedua, objek referensi, yaitu entitas yang diklaim berada dalam kondisi terancam, seperti negara, masyarakat, atau identitas tertentu. Ketiga, audiens, yaitu pihak yang menjadi target dari klaim ancaman dan memiliki peran menentukan dalam menerima atau menolak klaim tersebut. Keempat, *existential threat*, yaitu konstruksi ancaman yang diposisikan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan objek referensi. Kelima, *extraordinary measures*, yaitu tindakan yang melampaui prosedur politik normal yang dilegitimasi melalui keberhasilan sekuritisasi.²³

1.7.1 Sekuritisasi dalam Perspektif Thierry Balzacq

Seiring perkembangan dinamika kajian hubungan internasional, pendekatan Mazhab Kopenhagen juga menghadapi sejumlah kritik yang kemudian menjadi dasar pengembangan lebih lanjut. Salah satu kritik utama adalah kecenderungan menempatkan bahasa sebagai faktor dominan dalam proses sekuritisasi, sehingga mengabaikan peran praktik non-diskursif dan kondisi sosial yang memengaruhi

²³ Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, Inc. (United States of America: Lynne Rienner Publishers, 1998).

keberhasilan klaim ancaman.²⁴ Selain itu, konsep audiens dalam pendekatan ini sering diposisikan secara abstrak, tanpa penjelasan yang memadai mengenai bagaimana audiens terbentuk, berinteraksi, dan memberikan respons terhadap klaim ancaman. Kritik lain menyoroti kurangnya perhatian terhadap dinamika kekuasaan dan konteks yang membentuk kemungkinan keberhasilan sekuritisasi, sehingga proses tersebut seolah-olah bersifat universal dan tidak bergantung pada kondisi tertentu.²⁵

Pengembangan terhadap keterbatasan tersebut dilakukan oleh Thierry Balzacq yang menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis praktik. Dalam *Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve*, Balzacq mengembangkan definisi sekuritisasi sebagai rangkaian praktik yang saling terhubung, di mana ancaman dibentuk secara kontekstual dan kemudian disirkulasikan kepada audiens.²⁶ Perbedaan mendasar nya dengan Mazhab Kopenhagen terletak pada cara memahami mekanisme sekuritisasi. Balzacq berpendapat bahwa sekuritisasi merupakan rangkaian praktik yang berkembang secara bertahap, dalam arti lain, tindakan tutur yang diutamakan oleh Mazhab Kopenhagen dipandang sebagai salah satu bagian dari proses yang lebih luas dalam rangkaian praktik tersebut.²⁷

Balzacq juga memperluas analisis dengan memperkenalkan konsep *levels of analysis* yang terdiri dari *agents*, *Acts*, dan *context*. Level *agents* mencakup tentang

²⁴ Holger Stritzel, "Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond," *European Journal of International Relations* 13, no. 3 (2007): 357–83, <https://doi.org/10.1177/1354066107080128>.

²⁵ Dagmar Rychnovska, "Securitization and the Power of Threat Framing," *Institute of International Relations, NGO* 22, no. 2 (2014): 9–31.

²⁶ Thierry Balzacq, "Securitization Theory: Past, Present, and Future," *University of Chicago Press* 51, no. 2 (2019).

²⁷ Thierry Balzacq, *Securitization Theory, How Security Problems Emerge and Dissolve* (Routledge, 2011).

identifikasi aktor yang terlibat, relasi kekuasaan, serta identitas yang membentuk tindakan mereka. Level *Acts* berfokus pada praktik yang digunakan dalam proses sekuritisasi, baik dalam bentuk diskursif maupun non-diskursif. Level *context* menempatkan seluruh proses tersebut dalam kondisi sosial dan historis tertentu yang memengaruhi kemungkinan keberhasilan sekuritisasi. Pembagian ini mempermudah penelitian untuk memfokuskan analisis pada level tertentu. Pemilihan kerangka ini dimaksudkan untuk membantu penelitian, agar menangkap dan memahami dinamika dalam proses sekuritisasi yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui analisis bahasa.

1.7.2 Level of Analysis dalam Sekuritisasi

Dalam buku *Securitization Theory, How Security Problems Emerge and Dissolve*, Balzacq mengembangkan kerangka level analisis yang terdiri dari *Agents*, *Acts*, dan *Contexts* sebagai perangkat analitis. Setiap level merepresentasikan tingkat yang berbeda dalam memahami bagaimana suatu isu dikonstruksi sebagai ancaman. Level *Agents* berfokus pada aktor yang terlibat, termasuk posisi kekuasaan, identitas, serta relasi yang memengaruhi kemampuan mereka dalam mengartikulasikan klaim ancaman. Level *Acts* memfokuskan analisis pada praktik-praktik dalam proses sekuritisasi. Sedangkan pada level *Context*, pembahasan berfokus pada apa yang menjadi latar terjadinya sekuritisasi.²⁸

Dalam menganalisis proses sekuritisasi pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada level *Acts*. Pemilihan ini relevan dengan tujuan penelitian untuk mengkaji praktik-praktik yang dilakukan dalam proses sekuritisasi. Untuk menganalisis proses sekuritisasi dari produksi, penyebaran, hingga penerimaan

²⁸ Balzacq.

atau penolakan terhadap klaim ancaman, level *Acts* ini akan mengkaji empat sisi, yaitu:

1. *Action-type*, ini merujuk pada penggunaan bahasa dalam melakukan tindakan, termasuk pilihan struktur dan bentuk pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan ancaman.
2. *Strategic*, merujuk pada penggunaan perangkat heuristik, seperti metafora, emosi, atau framing tertentu yang dirancang oleh aktor sekuritisasi untuk menciptakan kondisi yang dapat memengaruhi audiens.
3. Dispositif, sisi ini mengacu pada kumpulan praktik dan alat yang digunakan secara bersamaan untuk mendukung klaim ancaman. Ini menunjukkan bahwa proses sekuritisasi berjalan melalui kombinasi berbagai tindakan.
4. Kebijakan yang dihasilkan, bagian ini mencerminkan bagaimana praktik sekuritisasi terwujud dalam tindakan yang konkret.²⁹

Penjelasan mengenai keempat sisi dari level *Acts* ini menjelaskan bahwa sekuritisasi merupakan rangkaian praktik yang saling terhubung. Analisis pada level ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana praktik tersebut bekerja secara berurutan dalam membentuk proses sekuritisasi.

1.7.3 Proses Sekuritisasi dalam Perspektif Balzacq

²⁹ Balzacq.

Menurut Thierry Balzacq, sekuritisasi merupakan proses strategis yang dilakukan aktor untuk membangun pemahaman ancaman kepada audiens tertentu melalui praktik yang berlangsung dalam konteks tertentu. Balzacq menjelaskan bahwa “*securitization is a sustained strategic practice aimed at convincing the target audience to accept a claim that a specific development is threatening enough to deserve an immediate policy to alleviate it*”.³⁰ Kemudian dalam bagian lain dari buku *Securitization Theory, How Security Problems Emerge and Dissolve*, balzacq juga mendefinisikan bahwa sekuritisasi adalah “*a set of interrelated practices, and the processes of their production, diffusion, and reception/translation that bring threats into being*.” Berdasarkan pemahaman tersebut, proses sekuritisasi dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian praktik yang meliputi konstruksi ancaman, penyebaran ancaman kepada audiens, penerimaan serta legitimasi terhadap tindakan politik tertentu sebagai respons atas ancaman tersebut. Berdasarkan level analisis pada level Acts yang telah dijelaskan Balzacq, maka, proses sekuritisasi yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tahap pertama adalah konstruksi ancaman eksistensial melalui sisi *action-type*. Pada tahap ini, pemerintah Tuvalu membangun perubahan iklim sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara. Ancaman tersebut tidak lagi dikonstruksi sebagai persoalan lingkungan, tetapi sebagai ancaman terhadap *sovereignty, territorial existence*, keberlanjutan populasi, dan *continuity of statehood* Tuvalu akibat kenaikan permukaan laut. Dalam tahap ini, penelitian menganalisis bagaimana pemerintah Tuvalu secara konsisten merepresentasikan perubahan iklim sebagai *existential threat* melalui tindakan diskursif dan non-

³⁰ Balzacq.

diskursif, seperti pidato resmi kepala negara dan pejabat pemerintah, pernyataan dalam forum internasional seperti United Nations Climate Change Conference dan United Nations General Assembly, serta berbagai dokumen diplomatik dan pernyataan resmi terkait perubahan iklim. Analisis pada tahap ini diarahkan untuk melihat bagaimana ancaman dibangun melalui penggunaan diksi keamanan, keberlangsungan negara, kehilangan wilayah, dan risiko hilangnya kapasitas negara Tuvalu di masa depan.

Tahap kedua adalah penyebaran ancaman kepada audiens menggunakan *strategic practice* serta penggunaan *dispositif*. Pada tahap ini, pemerintah Tuvalu membawa narasi ancaman perubahan iklim ke dalam berbagai ruang diplomatik untuk memperoleh pengakuan dan dukungan terhadap ancaman yang dihadapi Tuvalu. Balzacq menjelaskan bahwa “*the securitizing actor works to establish an understanding with the audience that the threat is worthy of attention*”.³¹ Oleh sebab itu, penelitian menganalisis bagaimana pemerintah Tuvalu menyebarkan *framing* ancaman perubahan iklim melalui diplomasi bilateral, forum internasional, kerja sama regional Pasifik, serta berbagai pernyataan bersama dengan negara mitra. Dalam tahap ini, Australia diposisikan sebagai *target audience* karena memiliki kapasitas material, institusional, dan politik untuk memberikan respons konkret terhadap ancaman perubahan iklim melalui kerja sama bilateral. Selain itu, komunitas internasional juga dianalisis sebagai audiens penting dalam proses pembentukan legitimasi internasional terhadap ancaman eksistensial yang dihadapi Tuvalu. Penelitian juga mempertimbangkan masyarakat domestik Tuvalu sebagai

³¹ Balzacq.

audiens politik internal karena penerimaan domestik menjadi faktor penting dalam legitimasi kebijakan bilateral yang dibangun pemerintah Tuvalu.

Tahap ketiga adalah penerimaan ancaman oleh audiens melalui legitimasi tindakan yang dikaji dari kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan. Dalam pendekatan Balzacq, sekuritisasi dapat dikatakan berhasil ketika ancaman tersebut memperoleh resonansi dan diterima oleh audiens tertentu. Dalam konteks Australia sebagai target audience utama, legitimasi tindakan terlihat melalui pembentukan Falepili Union Treaty yang memuat berbagai *extraordinary arrangements*, seperti *climate mobility pathway*, *continuity of statehood support*, dan pengaturan kerja sama keamanan bilateral antara Australia dan Tuvalu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa ancaman perubahan iklim yang dibawa Tuvalu telah diterjemahkan ke dalam *institutional arrangement* yang melampaui pola hubungan bilateral reguler.

Sementara itu, pada level komunitas internasional, legitimasi ancaman terlihat melalui meningkatnya pengakuan internasional terhadap *climate security* dan ancaman eksistensial yang dihadapi *small island states*. Bentuk legitimasi tersebut terlihat melalui dukungan diplomatik terhadap agenda pendanaan *loss and damage*, pengakuan terhadap ancaman *climate displacement*, serta meningkatnya perhatian internasional terhadap isu *continuity of statehood* bagi negara kepulauan kecil yang terdampak perubahan iklim.

Pada level domestik, legitimasi ancaman perubahan iklim terlihat melalui institusionalisasi ancaman tersebut ke dalam kerangka kebijakan negara Tuvalu, terutama melalui pengesahan Constitution of Tuvalu Act 2023. Amandemen konstitusi tersebut memasukkan perubahan iklim sebagai ancaman terhadap

keberlangsungan negara Tuvalu dan menegaskan keberlanjutan kenegaraan Tuvalu meskipun terjadi kehilangan wilayah fisik akibat kenaikan permukaan laut. Dalam Section 2(1), konstitusi menyatakan bahwa *‘The State of Tuvalu within its historical, cultural, and legal framework shall remain in perpetuity in the future, notwithstanding the impacts of climate change or other causes resulting in loss to the physical territory of Tuvalu.’* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman perubahan iklim telah memperoleh legitimasi politik dan hukum dalam struktur domestik Tuvalu.

Melalui tahapan tersebut, penelitian dapat memetakan proses sekritisasi yang dilakukan Tuvalu, mulai dari pembentukan makna ancaman, penyebaran klaim ancaman hingga ancaman tersebut diterima dalam berbagai bentuk kebijakan yang dihasilkan.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok.³² Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk membongkar proses konstruksi makna keamanan yang dilakukan oleh Tuvalu terkait isu perubahan iklim.

³² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications, Ltd., vol. 16, 2009, <https://doi.org/10.1016/j.math.2010.09.003>.

Desain deskriptif analitis digunakan untuk menelusuri proses sekuritisasi secara bertahap, mulai dari perumusan klaim ancaman hingga penerimaan oleh audiens. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana elit politik Tuvalu membingkai kenaikan permukaan laut sebagai ancaman terhadap keberlanjutan negara, serta bagaimana klaim tersebut dilegitimasi melalui berbagai praktik. Dengan desain ini, penelitian ingin menjelaskan bagaimana kondisi tersebut diubah menjadi dasar bagi tindakan yang melampaui kebijakan biasa.

1.8.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Tuvalu dalam merespons kenaikan permukaan laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan sekuritisasi Thierry Balzacq dengan titik analisis pada level *Acts*, sehingga penelitian dipusatkan pada praktik-praktik sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Tuvalu dalam membangun, menyebarkan, dan melegitimasi ancaman perubahan iklim. Untuk menjaga kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada rentang waktu tahun 2021 hingga 2025 dan memantau sedikit perkembangan hingga pertengahan 2026.

Tahun 2021 dipilih sebagai titik awal karena pada periode tersebut Pemerintah Tuvalu mulai memperkuat konstruksi perubahan iklim sebagai *existential threat* secara lebih konsisten melalui berbagai forum dan agenda internasional. Salah satu momentum penting terlihat dalam pidato Perdana Menteri Tuvalu pada COP26 di Glasgow yang menegaskan bahwa kenaikan permukaan laut mengancam keberlangsungan wilayah, identitas nasional, dan keberlanjutan kenegaraan Tuvalu. Pada periode ini, perubahan iklim mulai secara eksplisit dibingkai sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara.

Untuk menjaga fokus penelitian, audiens dalam proses sekuritisasi dibatasi pada tiga pihak utama, yaitu Australia, komunitas internasional (dalam hal ini negara-negara anggota rezim perubahan iklim internasional), dan parlemen Tuvalu. Australia diposisikan sebagai target audience utama karena memiliki kapasitas politik, material, dan institusional dalam menghasilkan respons konkret terhadap ancaman perubahan iklim yang dibangun Tuvalu. Dalam konteks ini, penelitian dibatasi pada bentuk respons Australia yang terinstitusionalisasi melalui Falepili Union Treaty, khususnya terkait *climate mobility pathway*, *continuity of statehood support*, dan pengaturan kerja sama keamanan bilateral.

Negara-negara anggota rezim perubahan iklim internasional, khususnya dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), diposisikan sebagai audiens internasional dalam penelitian ini. Audiens ini menjadi penting karena Pemerintah Tuvalu secara aktif membangun framing perubahan iklim sebagai *existential threat* melalui forum-forum internasional seperti Conference of the Parties (COP), United Nations General Assembly, dan berbagai forum diplomasi perubahan iklim lainnya. Dalam konteks ini, penelitian dibatasi pada bentuk respons internasional yang berkaitan dengan pengakuan terhadap kerentanan *small island states* akibat kenaikan permukaan laut. Bentuk respons tersebut meliputi dukungan terhadap pembentukan mekanisme *Loss and Damage Fund* dalam COP27 dan COP28, meningkatnya perhatian internasional terhadap isu *climate displacement* dan *continuity of statehood* bagi *small island states*, serta dukungan diplomatik terhadap inisiatif seperti *Rising Nations Initiative* yang diusung Tuvalu dan negara-negara *Pacific Small Island Developing States*. Berbagai respons tersebut dianalisis sebagai bentuk penerimaan

dan legitimasi internasional terhadap ancaman eksistensial perubahan iklim yang dibangun Pemerintah Tuvalu.

Sementara itu, parlemen Tuvalu diposisikan sebagai audiens internal yang berkaitan dengan legitimasi politik domestik terhadap praktik sekuritisasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini, penelitian dibatasi pada institusionalisasi ancaman perubahan iklim ke dalam kebijakan domestik melalui Constitution of Tuvalu Act 2023. Amandemen tersebut dianalisis sebagai bentuk legitimasi politik domestik terhadap framing perubahan iklim sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara Tuvalu.

Batasan hingga tahun 2025 digunakan untuk menangkap perkembangan proses sekuritisasi setelah ancaman perubahan iklim mulai diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan, diplomasi, dan *institutional arrangement* oleh pemerintah Tuvalu, baik pada level bilateral, internasional, maupun domestik.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Tuvalu dalam mengonstruksi kenaikan permukaan laut sebagai ancaman terhadap keberlanjutan negara. Fokus analisis penelitian diarahkan pada proses konstruksi ancaman perubahan iklim sebagai *existential threat*, proses penyebaran ancaman kepada berbagai audiens, penerimaan ancaman oleh audiens, serta legitimasi dalam berbagai kebijakan yang dihasilkan dari proses sekuritisasi tersebut. Dalam konteks ini, penelitian menganalisis bagaimana praktik sekuritisasi Tuvalu menghasilkan berbagai bentuk respons, seperti Falepili Union Treaty dengan Australia, dukungan internasional terhadap isu *continuity of statehood* dan *climate displacement* dalam forum perubahan iklim internasional, serta

institusionalisasi ancaman perubahan iklim ke dalam Constitution of Tuvalu Act 2023.

Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada level negara, dengan fokus pada praktik sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Tuvalu dalam relasinya dengan audiens eksternal maupun domestik. Pada level eksternal, penelitian difokuskan pada interaksi Pemerintah Tuvalu dengan Australia serta negara-negara anggota rezim perubahan iklim internasional dalam forum seperti UNFCCC. Sementara itu, pada level domestik, penelitian difokuskan pada legitimasi politik internal terhadap praktik sekuritisasi yang dilakukan pemerintah.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan dengan proses sekuritisasi yang diteliti.³³ Pengumpulan data dilakukan secara bertahap mengikuti alur analisis proses sekuritisasi dalam perspektif Thierry Balzacq, yaitu tahap konstruksi ancaman, penyebaran ancaman kepada audiens, serta penerimaan ancaman melalui legitimasi serta kebijakan yang dihasilkan. Kemudian juga dianalisis data pendukung yang memuat konteks dan memperkuat interpretasi data utama, seperti laporan lembaga internasional, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi media yang relevan.³⁴

Pada tahap konstruksi ancaman eksistensial, penelitian mengumpulkan data berupa pidato resmi pemerintah Tuvalu, pernyataan pejabat negara, dokumen diplomatik, dan dokumen kebijakan nasional yang memuat artikulasi perubahan

³³ Creswell.

³⁴ Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition*, 4th ed. (Oxford University Press, 2012).

iklim sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara. Data utama pada tahap ini meliputi pidato Perdana Menteri Tuvalu dalam United Nations General Assembly dan COP, khususnya pidato pada COP26 tahun 2021 di Glasgow, berbagai pernyataan resmi pemerintah terkait *sea level rise* dan *continuity of statehood*, serta dokumen kebijakan nasional seperti Te Kete. Data tersebut dipilih karena secara langsung memuat framing perubahan iklim sebagai *existential threat* terhadap *sovereignty*, *territorial existence*, dan keberlangsungan populasi Tuvalu. Dari data tersebut, penelitian menganalisis bagaimana pemerintah Tuvalu membangun makna ancaman melalui penggunaan diksi keamanan, ancaman kehilangan wilayah, ancaman terhadap keberlanjutan negara, serta representasi perubahan iklim sebagai ancaman yang membutuhkan respons khusus.

Pada tahap penyebaran ancaman kepada audiens, penelitian mengumpulkan data berupa dokumen kerja sama bilateral dan multilateral, *joint statement*, dokumen kerja sama regional Pasifik, serta berbagai bentuk praktik yang menunjukkan upaya Pemerintah Tuvalu dalam menyebarkan framing ancaman perubahan iklim kepada berbagai audiens. Data utama pada tahap ini meliputi *joint statement* Tuvalu dan Australia, dokumen negosiasi Falepili Union Treaty, dokumen diplomasi dalam PIF, pernyataan Tuvalu dalam forum UNFCCC, serta dokumen terkait Rising Nations Initiative dan Digital Nation. Data tersebut dipilih karena menunjukkan bagaimana ancaman perubahan iklim disebarkan melalui *strategic practice* dan penggunaan *dispositif* dalam berbagai forum pembahasan. Dari data tersebut, penelitian menganalisis bagaimana Pemerintah Tuvalu menghubungkan ancaman perubahan iklim dengan isu keamanan, mobilitas

penduduk, keberlanjutan kenegaraan, dan stabilitas kawasan untuk memperoleh perhatian dan dukungan dari audiens eksternal maupun domestik.

Pada tahap penerimaan ancaman oleh audiens melalui legitimasi tindakan, penelitian mengumpulkan data berupa kebijakan, perjanjian bilateral, dokumen kebijakan, dan berbagai bentuk pengakuan yang muncul sebagai respons terhadap ancaman perubahan iklim yang dibangun Tuvalu. Dalam konteks Australia sebagai target audience, data utama yang digunakan adalah dokumen resmi Falepili Union Treaty beserta pernyataan resmi pemerintah Australia dan Tuvalu terkait implementasi *climate mobility pathway*, *continuity of statehood support*, dan kerjasama keamanan bilateral. Data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana ancaman perubahan iklim yang dibangun Tuvalu, diterjemahkan ke dalam bentuk *institutional arrangement* yang melampaui pola hubungan bilateral reguler.

Dalam konteks audiens internasional, penelitian mengumpulkan data berupa dokumen hasil COP27 dan COP28 terkait *loss and damage fund*, dokumen UNFCCC mengenai *climate displacement* dan *small island states*, serta berbagai dokumen internasional yang memuat pengakuan terhadap ancaman perubahan iklim bagi keberlangsungan *small island states*. Data tersebut dipilih karena menunjukkan bentuk penerimaan dan legitimasi internasional terhadap framing ancaman yang dibangun Tuvalu. Dari data tersebut, penelitian menganalisis bagaimana ancaman perubahan iklim mulai memperoleh pengakuan internasional sebagai isu yang mengancam eksistensial negara.

Sementara itu, pada level domestik, penelitian mengumpulkan data berupa Constitution of Tuvalu Act 2023 dan dokumen yang berkaitan dengan perubahan

iklim dan keberlangsungan negara Tuvalu. Data tersebut dipilih karena menunjukkan institusionalisasi ancaman perubahan iklim ke dalam kebijakan domestik Tuvalu. Dari data tersebut, penelitian menganalisis bagaimana ancaman perubahan iklim memperoleh legitimasi politik dan hukum melalui pengakuan konstitusional terhadap *continuity of statehood* meskipun terjadi kehilangan wilayah akibat kenaikan permukaan laut.

Selain data utama tersebut, penelitian juga menggunakan data pendukung berupa artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, *policy paper*, dan publikasi media yang relevan untuk memperkuat interpretasi terhadap data utama serta membantu menjelaskan konteks geopolitik, perkembangan diskursus *climate security*, dan dinamika diplomasi perubahan iklim yang melingkupi proses sekuritisasi Tuvalu.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.³⁵ Model ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pengolahan data berlangsung secara sistematis sejak tahap awal pengumpulan data hingga interpretasi akhir. Teknik ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis proses sekuritisasi yang berlangsung melalui berbagai praktik diplomatik, dokumen politik, dan institutional arrangement, sehingga membutuhkan proses analisis yang dilakukan secara bertahap dan saling berhubungan.

³⁵ Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3rd editio (Sage Publications, Ltd., 2014).

Tahap pertama adalah kondensasi data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang dianalisis dibatasi pada dokumen dan praktik yang berkaitan langsung dengan proses sekuritisasi perubahan iklim yang dilakukan Pemerintah Tuvalu dalam periode 2021 hingga 2025. Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tahapan proses sekuritisasi dalam perspektif Thierry Balzacq, yaitu konstruksi ancaman, penyebaran ancaman kepada audiens, serta penerimaan ancaman melalui legitimasi kebijakan dan institutional arrangement.

Pada tahap konstruksi ancaman, peneliti menyeleksi data berupa pidato resmi pemerintah Tuvalu, dokumen diplomatik, dan kebijakan nasional yang memuat framing perubahan iklim sebagai existential threat. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana Pemerintah Tuvalu membangun ancaman terhadap sovereignty, territorial existence, dan continuity of statehood melalui penggunaan diksi keamanan dan keberlangsungan negara.

Pada tahap penyebaran ancaman, peneliti menyeleksi data berupa praktik kerjasama, joint statement bilateral, dokumen kerjasama regional Pasifik, serta dokumen diplomasi internasional yang menunjukkan upaya Pemerintah Tuvalu dalam menyebarkan framing ancaman kepada berbagai audiens. Analisis pada tahap ini diarahkan untuk melihat bagaimana strategic practice dan dispositif digunakan dalam menyebarkan ancaman perubahan iklim melalui ruang diplomatik bilateral maupun multilateral.

Sementara itu, pada tahap penerimaan ancaman dan legitimasi tindakan, peneliti menyeleksi data berupa Falepili Union Treaty, dokumen COP terkait loss

and damage fund, dokumen UNFCCC mengenai climate displacement dan small island states, serta Constitution of Tuvalu Act 2023. Data tersebut dianalisis untuk melihat bagaimana ancaman perubahan iklim memperoleh resonansi dan diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan.

Tahap kedua adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah dikondensasi disusun secara sistematis sesuai alur proses sekuritisasi yang digunakan dalam penelitian. Penyajian data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan antara tindakan sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Tuvalu, audiens yang dituju, serta bentuk respons dan legitimasi yang dihasilkan dari proses tersebut. Melalui penyajian data ini, penelitian berupaya menunjukkan hubungan antara konstruksi ancaman perubahan iklim, praktik penyebaran ancaman dalam ruang diplomatik, hingga terbentuknya beberapa kebijakan sebagai bentuk penerimaan terhadap ancaman yang dibangun Tuvalu.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai proses sekuritisasi perubahan iklim yang dilakukan Pemerintah Tuvalu berdasarkan pola hubungan yang ditemukan dalam data. Kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis pada setiap tahapan proses sekuritisasi untuk melihat bagaimana perubahan iklim dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial, bagaimana ancaman tersebut memperoleh resonansi pada berbagai audiens, serta bagaimana ancaman tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan yang mengandung tindakan luar biasa. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data, dokumen resmi, dan literatur pendukung agar interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dengan fokus penelitian dan kerangka teoritis yang digunakan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KONDISI GEOGRAFIS DAN UPAYA TUVALU DALAM MENANGGAPI KENAIKAN PERMUKAAN LAUT

Bab II membahas kondisi geografis yang dialami Tuvalu sebagai dampak kenaikan permukaan laut yang terjadi. Dalam bab ini juga dijelaskan beberapa tindakan atau upaya yang dilakukan Tuvalu dalam rangka menanggapi ancaman kenaikan permukaan laut, baik itu berupa pembentukan kebijakan ataupun kerja sama yang dilakukan oleh Tuvalu.

BAB III: DINAMIKA KONTEKS KEAMANAN IKLIM TUVALU

Bab III membahas situasi keamanan yang dialami Tuvalu yang menjadi faktor-faktor dalam perumusan kebijakan dan penentu langkah kerja sama yang diambil oleh Tuvalu. Dalam bab ini juga dijelaskan beberapa tanggapan yang muncul terkait tindakan Tuvalu dalam menanggapi kenaikan permukaan laut.

BAB IV: PROSES SEKURITISASI KENAIKAN PERMUKAAN LAUT OLEH TUVALU DALAM KERANGKA THIERRY BALZACQ

Bab IV membahas proses upaya keamanan yang dilakukan Tuvalu demi mencapai hal-hal yang ingin dicapai, dalam hal ini adalah jaminan keselamatan masa depan negara dan kedaulatan nya. Analisis proses ini menggunakan kerangka Thierry Balzacq dalam *level of Acts*.

BAB V: PENUTUP

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan terkait keseluruhan isi penelitian dan saran-saran untuk penelitian lanjutan yang dapat dilakukan setelah penelitian ini selesai.

